

BAB III

SEJARAH KEPEMILIKAN NUKLIR KOREA UTARA SERTA PERKEMBANGANNYA

Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK), atau Korea Utara merupakan sebuah negara yang berada di Benua Asia, lebih tepatnya Asia Timur. Ibu kota dari negara tersebut terletak di kota terbesarnya, yaitu Pyongyang. Menguasai bagian wilayah utara seluas 120.540 km². Untuk perbatasan dengan negara lain yaitu Zona Demiliterisasi Korea merupakan perbatasan dengan Korea Selatan, berbatasan disebelah utara dengan Tiongkok yang dibentuk melalui Sungai Amnok dan Sungai Tumen dan berbatasan dengan Rusia. Batas sebelah Barat Korea Utara adalah Sungai kuning dan Teluk Korea, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Jepang, yaitu seberang Laut Timur atau Laut Jepang. Titik tertinggi yang ada di Korea Utara adalah Gunung Paektu-san dengan ketinggian 2744 meter. Kemudian terdapat sungai terpanjang di Korea Utara yaitu Sungai Amnok dengan panjang 790 kilometer (Caraway, 2007).

Pada awalnya Semenanjung Korea dikuasai oleh Kekaisaran Korea hingga akhirnya dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia dengan Jepang pada tahun 1905. Setelah kekalahan yang dialami oleh Jepang pada Perang Dunia II, Semenanjung Korea terbagi menjadi dua yang diduduki oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak adanya pemilihan umum pada tahun 1948 yang diadakan oleh PBB, sehingga mengakibatkan adanya perang korea tahun 1950 antara Korea Utara dan Selatan. Sebuah gencatan senjata pada tahun 1953 mengakhiri Perang Korea.

Walaupun kedua negara mengakhiri peperangan dengan gencatan senjata, namun secara resmi masih belum mengakhiri status perang diantara keduanya, karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani (Foxnews, 2009). Kedua negara diterima menjadi anggota PBB pada tahun 1991 (Sanger, 1991). Korea Utara merupakan negara dengan satu

partai, yaitu Partai Buruh Korea. Pemerintahan yang dimiliki mengikuti ideologi Juche yang digagas oleh Kim Il-sung, merupakan mantan pemimpin Korea Utara. Namun untuk secara resminya sebagai Republik sosialis. Hingga saat ini Korea Utara dipandang oleh banyak negara sebagai negara kediktatoran totaliter berpahan Stalinis (Unit, 2007). Setelah kematian Kim Jong-il pada tanggal 19 Desember 2011, kepemimpinan Korea Utara digantikan oleh Kim Jong-un, yaitu anak termuda dari Kim Jong-il.

A. Pembagian Korea

Pada bulan Agustus tahun 1945, tentara dari Uni Soviet telah membentuk Otoritas Sipil Soviet untuk memerintah negara tersebut hingga sebuah rezim domestik yang bersahabat dengan Uni Soviet dapat dibentuk. Masuknya Uni Soviet kedalam Korea Utara termasuk awal mulanya pengenalan teknologi uranium nuklir kepada negara tersebut. Tentara Uni Soviet mundur pada tahun 1948 yang mana mengakhiri harapan bahwa negara tersebut dapat disatukan kembali menurut cara revolusi Komunis. Pada tahun 1949, rezim dari Utara mempertimbangkan untuk melakukan intervensi militer ke Korea Selatan, namun mengalami kegagalan karena tidak mendapat dukungan dari Uni Soviet (Cummings, 1945-1947). Penarikan kekuatan militer Amerika Serikat dari Korea Selatan pada bulan Juni 1949, memperlemah rezim yang ada di Selatan. Hal tersebut menjadikan Kim Il-sung berkeinginan untuk melanjutkan rencana invasinya. Pada awalnya gagasan dari Kim Il-sung ditolak Joseph Stalin, namun karena adanya perkembangan persenjataan nuklir yang dimiliki Uni Soviet, kemenangan Mao Zedong di Tiongkok, dan adanya tanda bahwa bangsa Tiongkok akan memberikan bantuan militer terhadap Korea Utara membuat Stalin menyetujui, dan akhirnya menjadikan cikal bakal Perang Korea (Martin, 2004, hal. 66-67).

Perang Korea merupakan perang antara Korea Utara dengan Korea Selatan yang dimulai pada tanggal 25 Juni 1950. Sempat terhenti pada tanggal 27 Juli 1953 dengan perjanjian gencatan senjata. Penyebab terjadinya perang tersebut adalah karena adanya pembagian Korea dan upaya yang dilakukan untuk penyatuan dibawah pemerintahan masing-masing. Akibat dari Perang Korea telah menewaskan lebih dari 2 juta penduduk dan prajurit baik dari Korea Utara maupun Selatan. Sebelum adanya Perang Korea, terdapat tanda bahwa keduanya akan melakukan perselisihan, yaitu adanya konflik perbatasan pada paralel utara ke-38 dan upaya pemilihan umum bagi keutuhan Korea (Hermes, 1966). Sejak adanya gencatan senjata pada tahun 1953, hubungan antara pemerintahan Korea Utara dengan Korea Selatan, Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang tetap tegang, bahkan hingga sekarang. Walaupun kedua negara telah mengakhiri perang dengan gencatan senjata, namun secara teknis kedua negara masih dalam keadaan perang. Baik dari Korea Utara maupun Korea Selatan menandatangani Deklarasi Gabungan Utara-Selatan pada tanggal 15 Juni tahun 2000, ketika dari kedua belah pihak akan berjanji untuk mengupayakan penyatuan kembali dengan cara damai. Selain itu, pada tanggal 4 Oktober 2007, para pemimpin dari kedua belah pihak bergandengan tangan untuk mengadakan rapat puncak yang membicarakan pernyataan untuk menghentikan perang secara resmi dan mengukuhkan kembali prinsip non agresi (Reuters, 2007).

Namun secara resmi kedua belah pihak masih belum menandatangani perjanjian perdamaian. Sehingga kedua negara masih tetap berada pada status gencatan senjata. Beberapa upaya perjanjian perdamaian selalu disela oleh pertempuran kecil dan adanya upaya pembunuhan yang dilakukan Korea Utara terhadap pemimpin Korea Selatan, yang seringkali dikenal pada tahun 1968, 1974, dan pengeboman Rangoon pada tahun 1983. Seringkali ditemukan sebuah terowongan di daerah zona Demiliterisasi, dan perang sempat hampir meletus akibat insiden Pembunuhan Kapak di Panmunjeom pada tahun 1976 (Kirkbride, 1984).

B. Korea Utara

Korea Utara merupakan negara yang secara sepihak menyatakan bahwa negara tersebut sebagai negara Juche, yaitu negara yang percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri (FAQ, 2005). Terdapat pemujaan kepribadian oleh masyarakat terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang dilakukan secara terorganisir. Kim Il-sung merupakan pemimpin yang disebut Presiden Abadi, walaupun dia sudah meninggal pada tahun 1994 dan dikuburkan di Istana Memorial Kumsusan di Pyongyang pusat. Kepala negara adalah Kim Jong-un, walaupun kedudukan presiden dipegang oleh Kim Il-sung yang sudah meninggal. Kim Jong-un juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan legislatif yang ada di Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat yang saat ini diketuai oleh Kim Yong-nam. Korea Utara termasuk negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah yaitu Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, dan untuk koalisi Partai Buruh Korea, terdapat dua partai kecil lain, yaitu Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai-partai tersebut mengajukan semua calon untuk menempati posisi di pemerintahan dan memegang untuk kursi di Majelis Tertinggi Rakyat.

Korea Utara termasuk negara yang secara internasional menutup diri. Telah lama memelihara hubungan yang akrab dengan Tiongkok dan Rusia. Pada saat komunisme mengalami kemunduran di Eropa Timur pada tahun 1989 dan pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara pada tahun 1991, memiliki dampak terhadap semakin berkurangnya bantuan yang diberikan oleh Rusia, walaupun Tiongkok masih tetap memberikan bantuan penting untuk Korea Utara. Selain itu, Korea Utara menjalin hubungan dengan negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja (www1.korea-np.co.jp, 2001).

Tentara Rakyat Korea merupakan nama untuk Angkatan Bersenjata Korea Utara. Komandan Tertinggi Tentara Rakyat Korea Utara dan Ketua Komisi Pertahanan

Nasional Korea Utara berada pada pemimpin Korea Utara, dan untuk saat ini yaitu Kim Jong-un. Tentara yang ada di Korea Utara memiliki empat cabang, yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Departemen Keamanan Negara. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, untuk Angkatan Darat yang dimiliki Korea Utara merupakan terbesar kelima di dunia, diperkirakan berjumlah 1.21 juta personel, dengan perkiraan pria berusia 17 – 54 tahun (State, 2007). Strategi militer yang dimiliki Korea Utara dirancang untuk penyusupan dan menyabotase di belakang barisan musuh pada waktu perang. Perlengkapan perang kebanyakan merupakan yang ada dari sisa-sisa Perang Dunia II, yang umumnya teknologi pada waktu berlangsungnya Perang Dingin yang terproliferasi dan dari senjata Uni Soviet. Personel militer yang dimiliki Korea Utara per kapita memiliki presentase tertinggi di dunia, sekitar 1 serdadu yang terdaftar untuk setiap 25 warga negara (Nationmaster.com, 2007). Untuk perlengkapan perang, Korea Utara memiliki setidaknya 4.060 tank, 2.500 APC, 17.900 artileri (termasuk mortir), 11.000 senjata pertahanan udara, 915 kapal perang, dan 1.748 pesawat tempur (Division, 2004). Selain itu Korea Utara juga memiliki program nuklir yang aktif dan menjadi subjek bagi beberapa resolusi PBB seperti yang ada pada nomor 1695 pada bulan Juli 2006, nomor 1718 pada Oktober 2006, dan nomor 1874 pada Juni 2009.

Korea Utara memiliki ekonomi yang secara penuh dipegang oleh pusat. Merupakan salah satu dari dua negara yaitu Kuba dengan ekonomi yang dimilikinya dipegang dan direncanakan secara penuh oleh pemerintahan. Kebijakan isolasi yang diterapkan oleh Korea Utara menutup kemungkinan bahwa Korea Utara membatasi adanya perdagangan internasional. Pada tahun 1984, Korea Utara mengeluarkan undang-undang yang memperbolehkan investasi asing melalui *joint venture* (Kihl, 1985), namun mengalami kegagalan dalam menarik investasi yang berarti. Pada tahun 1991, Zona Ekonomi Khusus Rason didirikan dengan tujuan menarik investasi asing terutama dari Tiongkok dan Rusia, yang mana mereka mendapatkan hak untuk menggunakan pelabuhan

yang ada di Rason. Tiongkok sendiri telah memperbaiki jalan dari Rason menuju Tiongkok, dan Rusia pun juga telah merenovasi jalur kereta api dari Rason ke Rusia.

Untuk gaji rata-rata yang ada di Korea Utara yaitu sekitar USD 47 per bulan (Knipp, 2004). Walaupun ekonomi Korea Utara memiliki masalah secara substansial, namun untuk kualitas rakyat mulai memperlihatkan terus membaik dan upah untuk pekerja mengalami peningkatan (Yi-geun, 2007). Terdapat banyak pasar swasta diseluruh penjuru negara yang disebut *janmadang*, yang melayani penduduk dengan makanan dan komoditas tertentu dari impor yang ditukar dengan uang, sehingga membantuk dalam mencegah adanya kelaparan. Pemberian secara gratis terhadap rakyat oleh pemerintah meliputi makanan, rumah, kesehatan, dan pendidikan (Division, 2004), bahkan untuk pajak telah dihapuskan sejak tanggal 1 April 1974. Pada perkiraan tahun 2002, dalam ekonomi Korea Utara memiliki sektor utama yaitu industri sebesar 43.1 persen, jasa 33.6 persen, dan pertanian sebesar 23.3 persen.

C. Sejarah Nuklir Korea Utara

Pada saat terjadinya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, Semenanjung Korea dibagi menjadi dua oleh kedua negara yang merupakan pemenang perang sebelumnya. Untuk bagian Selatan berada pada pengaruh Amerika Serikat, dan sebelah Utara pada pengaruh Uni Soviet. Adanya pembagian tersebut merupakan keinginan yang dilakukan oleh kedua negara pada tahun 1945, serta bersifat kontradiktif dengan Konferensi Kairo tahun 1943, yang mana konferensi tersebut memiliki pernyataan bahwa kedua negara Korea harus bersatu. Namun pada Konferensi Yalta yang terjadi pada bulan Februari tahun 1945 telah mengizinkan Uni Soviet pada masa kepemimpinan Stalin untuk mendirikan zona penyangga sebagai negara satelit di Moskow dalam melawan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (Weathersby, 1993).

Untuk pertama kalinya pada tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan

melalui darat maupun udara. Aksi tersebut pun juga telah mendapat persetujuan dari Uni Soviet dan mendapat dukungan dalam bidang persenjataan. Dikarenakan pada masa itu Korea Selatan belum memiliki kekuatan persenjataan yang memadai, sehingga Korea Utara memiliki keunggulan dalam penyerangan tersebut. Penyerangan tersebut lebih dikenal sebagai Perang Korea atau forgotten war. Perang tersebut berakhir tiga tahun setelahnya yang ditandai dengan kesepakatan untuk membuat sebuah zona demiliterasi atau sebuah zona netral yang memisahkan kedua negara. Uni Soviet sendiri selain memberikan dukungan terhadap penyerangan tersebut, juga mulai mengimplikasikan penelitian nuklir di Korea Utara. Serangkaian penelitian dan percobaan untuk biji uranium telah dilakukan Uni Soviet di Korea Utara. Pada saat itu diperkirakan terdapat cadangan uranium sebesar 26 juta ton yang ada di Korea Utara. Pada tahun 1956, terdapat perjanjian kerja sama damai dalam penggunaan nuklir di antara kedua negara. Dalam perjanjian tersebut, mulai dikirimkan ilmuwan-ilmuwan Korea Utara untuk dikirimkan ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan terkait program nuklir di Moskow (Heo & Woo, 2008).

Pada saat itu, Korea Utara belum begitu memiliki teknologi yang memadai terkait pengembangan nuklir sendiri. Setelah China berhasil dalam melakukan uji coba bom nuklir pertamanya pada tahun 1964, Korea Utara terlihat mulai mendekati China untuk mempelajari teknologi senjata nuklir yang dimiliki China. Namun, dikarenakan China memberikan respon dingin terhadap keinginan Korea Utara, menjadikan Kim Il-sung semakin mempererat kerjasama dengan Moskow dan mulai mengembangkan kapabilitas rudal balistik sendiri. Pada tahun 1966, akhirnya Korea Utara mendirikan sebuah Akademi Militer Hamhung, dimana para militer Korea Utara mendapatkan pelatihan khusus terhadap pengembangan rudal. Uni Soviet sendiri telah menyediakan bantuan secara meluas kepada Korea Utara dalam membangun pusat penelitian di Yongbyon (Joseph S. Bermudez, 1999, hal. 2). Fasilitas yang dikembangkan pertama kali adalah reaktor nuklir model Uni

Soviet yang dioperasikan untuk tujuan penelitian. Di pusat penelitian tersebut, Uni Soviet membantu Korea Utara untuk menjalankan reaktor nuklir dengan daya 5 mw. Reaktor tersebut memiliki daya yang rendah, sehingga tidak memberikan perhatian dari negara-negara sekitar karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memproduksi plutonium yang dapat dijadikan sebagai bom nuklir.

Dimulai dengan adanya fasilitas nuklir di Yongbyon tersebut, perlahan dan pasti Korea Utara berhasil dalam memperoleh plutonium dan mulai menguasai dalam teknologi senjata nuklir, yang mana hal tersebut mendorong Kim Il-sung untuk membangun senjata nuklir yang lebih besar lagi (Joseph S. Bermudez, 1999, hal. 2). Kim Il-sung beranggapan bahwa dengan senjata nuklir tersebut akan menjadikan Korea Utara menjadi lebih kuat dari negara tetangganya yaitu Korea Selatan. Selain dari itu juga dapat digunakan dalam melawan serangan dari Amerika Serikat dan juga untuk mengurangi ketergantungan Korea Utara terhadap negara lain. Dengan adanya senjata nuklir yang dimiliki, akan menjamin keamanan bagi Korea Utara yang selama ini tidak pernah mendapat tawaran dari komunitas internasional. Pengembangan senjata nuklir tersebut menjadi sumber keamanan bagi rezim Kim Il-sung serta pemimpin-pemimpin Korea Utara selanjutnya (Joseph S. Bermudez, 1999, hal. 38). Pada akhir tahun 1970-an, program nuklir yang dimiliki Korea Utara menjadi prioritas nasional (Guoliang, 2005, hal. 36).

Pada bulan April tahun 1984, merupakan tanggal dimana Korea Utara mulai melakukan uji coba pertamanya terhadap rudal Scud-B. Adanya uji coba tersebut membuat Uni Soviet melakukan tekanan terhadap Korea Utara untuk bergabung dengan NPT pada tanggal 12 Desember 1985 dan menandatangani perjanjian NPT yang mana Korea Utara tidak akan menyebarkan nuklir yang dimilikinya. Ancaman yang diberikan oleh Moscow adalah akan menyetop pemberian bantuan terhadap Korea Utara (Heo & Woo, 2008, hal. 491). Tidak lama setelah bergabungnya dengan NPT, Korea Utara

menunjukkan keberatannya pada isi yang ada didalam perjanjian tersebut. Korea Utara merasa tidak terima dengan adanya pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas nuklir selama tujuh tahun.

Selanjutnya pada tahun 1986, Korea Utara telah melakukan penyulingan uranium. Tahun 1989, Korea Utara mulai membangun pabrik nuklir kelas 200 mw di Taechon. Kegiatan yang ada lebih difokuskan terhadap perolehan fasilitas yang dibutuhkan untuk penggunaan energi nuklir praktis maupun sistem pengembangan nuklir melalui pembangunan masal terhadap fasilitas daur ulang di Yongbyon. Pada tahun 1989 juga, kegiatan nuklir yang dimiliki terdeteksi kembali oleh satelit yang dimiliki Amerika Serikat (Heo & Woo, 2008, hal. 492). Terdapat beberapa instalasi-instalasi nuklir dengan bahan dasar plutonium yang mana oleh Korea Utara diusahakan untuk dioperasikan yaitu (Niksich, 2007, hal. 6):

1. Terdapat sebuah reaktor dengan kapasitas 5 mw yang telah beroperasi sejak tahun 1987. Mampu menghasilkan bahan bakar uranium yang cukup untuk menghasilkan sekitar 7 kg plutonium setiap tahunnya. Sempat dihentikan selama 70 hari pada tahun 1989. Kemudian pada bulan Mei 1994, reaktor tersebut dihentikan memindahkan 8000 balok bahan bakar yang masih dapat diproses menjadi plutonium yang dapat dijadikan 4-6 senjata nuklir. Pada bulan Februari 2003, reaktor tersebut pun mulai diaktifkan kembali.
2. Terdapat dua reaktor lebih besar dengan kisaran kapasitas 50 mw dan 200 mw yang dibangun di Yongbyon dan Taechon sejak tahun 1984. Jika kedua pabrik beroperasi, akan mampu memproduksi 200 kg plutonium dan dapat menghasilkan sekitar 30 bom nuklir setiap tahunnya.
3. Terdapat pabrik pengelolaan plutonium yang panjang bangunan tersebut mencapai 600 kaki dengan tingginya beberapa lantai. Pabrik tersebut akan digunakan untuk

memisahkan plutonium yang kemudian dimasukkan ke hulu ledak atau struktur dari bom nuklir.

1. Pengembangan Nuklir Pasca Perang Dingin

Masa tersebut ditandai dengan kematiannya Kim Il-sung tahun 1994 dan digantikan oleh Kim Jong-il, merupakan pemimpin yang telah memperkenalkan kebijakan *son'gun* (*military first*), yang mana lebih mengedepankan militer dalam hal menggantikan ideologi Juche dengan kebijakan *strong and prosperous great power* (Kuhn, 2010, hal. 35). Kim Jong-il mengubah Juche dikarenakan ideologi *military-centric* lebih dibutuhkan supaya transformasi sosial yang ada tidak membahayakan rezim yang dipimpinnya. Dalam konteks tersebut, memberikan Kim Jong-il prestise dan daya tawar dalam menghadapi komunitas internasional. Senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara dianggap sebagai alat dalam mempertahankan rezim yang akan memperluas dukungan domestik, alat penawar dalam meningkatkan pengakuan internasional, dan sebagai penangkal potensial dari ancaman-ancaman yang datang dari luar (Solingen, 2007, hal. 138-139).

Setelah berakhirnya Perang Dingin, kedua negara yaitu Korea Utara dan Korea Selatan menandatangani *Treaty of ReconCiliation and Nonaggression* pada tanggal 13 Desember 1991. Dari perjanjian tersebut, Seoul dan Pyongyang menyepakati untuk menghentikan permusuhan dan bekerja sama dalam bidang keamanan. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 1992, Korea Utara menerima perjanjian pengawasan yang dikeluarkan oleh NPT untuk menerima segala bentuk inspeksi atas kepemilikan nuklir Korea Utara oleh IAEA. Perjanjian tersebut bernama *Joint Declaration of Denuclearization of the Korean Peninsula*. Isi dari perjanjian tersebut yakni kedua negara Korea setuju untuk tidak melakukan uji coba, membuat, memproduksi, menerima, memiliki, menyimpan, menempatkan, dan menggunakan senjata nuklir. Ikatan dalam perjanjian tersebut juga mengikat kedua negara untuk tidak lagi memiliki fasilitas pengelolaan nuklir dan pengayaan uranium. Sesuai dengan perjanjian yang

ada, IAEA akan melakukan enam kali inspeksi di Korea Utara. Berdasarkan analisa lingkungan dan gambar yang terdeteksi oleh satelit Amerika Serikat, bahwa Korea Utara memiliki jumlah plutonium yang lebih banyak dari yang disampaikan. Maka dari itu, pihak IAEA mengajukan untuk melakukan pemeriksaan khusus yang kemudian mendapatkan penolakan oleh Korea Utara.

Akhirnya perselisihan yang dialami oleh IAEA dengan Korea Utara terus berlanjut. Sehingga IAEA meminta terhadap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan izin inspeksi khusus. Hal tersebut membuat Korea Utara merasa tersinggung dan akan mengancam untuk menarik keanggotaannya dari NPT pada tahun 1993. Usaha yang dilakukan Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan Korea Utara pertama kali dilakukan pada tahun 1994 ketika IAEA melaporkan bahwa Korea Utara gagal dalam memenuhi peraturan dan prosedur dari inspeksi (Solingen, 2007, hal. 118). Setelah adanya pembicaraan antara Washington dengan Pyongyang, akhirnya Korea Utara memutuskan untuk menunda penarikan keanggotaannya dari NPT. Walaupun demikian, Korea Utara tetap menolak untuk diadakannya inspeksi oleh IAEA. Pada akhirnya, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengumumkan bahwa Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan akan menjatuhkan sanksi jika Korea Utara masih tetap bersikeras untuk memproduksi plutonium. Korea Utara menafsirkan bahwa sanksi yang diberikan, merupakan pernyataan perang dan mengancam akan membombardir Korea Selatan. Dari sinilah krisis nuklir di Semenanjung Korea akhirnya terjadi.

2. Kesepakatan Jenewa tahun 1994

Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, melakukan usaha diplomatik dengan Korea Utara dengan tujuan agar krisis nuklir di Semenanjung Korea dapat berakhir, serta untuk menghindari adanya perang (Heo & Woo, 2008, hal. 493). Dari pertemuan tersebut tercipta negosiasi yang pada akhirnya nanti akan menghentikan krisis nuklir. Hasil dari

negosiasi tersebut adalah *Agreed Framework* (Kesepakatan Jenewa) pada tahun 1994. Isi dari persetujuan tersebut yakni penghentian program nuklir Korea Utara dengan diikuti pembongkaran fasilitas di Yongbyon. Sebagai imbalannya, Jepang dan Korea selatan akan membangun reaktor air ringan dengan kapasitas 200 mw dan Amerika Serikat akan menyediakan 500 ribu ton minyak solar setiap tahun untuk pemanasan dan pembangkit listrik sampai konstruksi pembangkit listrik tenaga air selesai dibangun. Dengan begitu akan terjadi normalisasi hubungan politik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Korea Utara, serta akan tercipta denuklirisasi di Semenanjung Korea. Lain hal, maka Korea Utara akan meneruskan keanggotaannya dalam NPT.

Dari Kesepakatan Jenewa, maka pada tahun 1995, dibuatlah *Korean Peninsula Development Organization* (KEDO). Memiliki tujuan untuk membangun dua reaktor air ringan yang disediakan oleh Amerika Serikat. Markas besar KEDO sendiri berada di New York dengan negara anggotanya yaitu Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Australia, Kanada, Brunei, Kuwait, Arab Saudi, Belgia, Philipina, Thailand, Italia, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Jerman. Namun, pada tahun 2002 semua konstruksi terpaksa berhenti karena adanya krisis nuklir Korea putaran kedua.

Korea Utara telah merancang dua misil jarak jauh yang dapat menjangkau wilayah Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 1998. Adanya program tersebut telah menyita perhatian dunia terkait cita-cita yang dimiliki Korea Utara, karena *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) tidak akan memiliki arti jika tidak diberi hulu ledak nuklir. Isu tersebut muncul ketika Korea Utara meluncurkan roket pada tanggal 31 Agustus 1998 dengan jangkauan jelajah 1700-2200 km, yang mana melewati wilayah Jepang dan mendarat di bagian barat Hawaii di Samudera Pasifik. Hal tersebut membuat Amerika Serikat dan Jepang berkeinginan untuk berhenti mendukung Kesepakatan Jenewa (Perry, 2006, hal. 82). Jika hal tersebut

dilakukan, maka membuka kemungkinan bahwa Korea Utara akan membuka kembali fasilitas nuklir yang ada di Yongbyon, dan tindakan tersebut akan membuka kesempatan Korea Utara untuk memproduksi lagi plutonium yang dapat digunakan sebagai hulu ledak nuklir. Otomatis akan memberikan dampak ancaman bagi negara-negara disekitarnya dan juga Amerika Serikat.

3. Krisis Nuklir Semenanjung Korea Periode Dua

Pada tanggal 29 Januari 2002, Presiden Amerika George W. Bush memberikan pernyataan bahwa Korea Utara merupakan an axis of evil, yaitu poros kejahatan. Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan adanya ikatan diplomatik dengan Korea Utara. Diketahui bahwa Korea Utara juga telah melakukan program nuklir di lain tempat selain di Yongbyon, yang merupakan tempat pengayaan uranium. Korea Utara merasa bahwa negaranya memiliki hak untuk mengembangkan senjata nuklir karena sikap permusushan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Krisis tersebut meningkat pada awal bulan Oktober 2002 ketika Korea Utara secara resmi tidak mngelak atas pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat James A. Kelly yaitu terkait kepemilikan pengayaan uranium serta telah melanggar perjanjian mereka. Amerika Serikat kemudian menghentikan bahan bakar minyak yang selama ini telah mereka sediakan sesuai dengan Kesepakatan Jenewa. Dalam hal tersebut, Korea Utara menolak adanya inspeksi yang dilakukan IAEA di Yongbyon dan akan membuka kembali reaktor yang dimilikinya, serta akan mengumumkan bahwa Korea Utara akan memproses kembali bahan bakar.

Pada masa tersebut, perhatian China terhadap nuklir Korea Utara meningkat, sehingga China mengajak untuk dilakukan pertemuan multilateral. Pertemuan berlangsung hingga lima kali di Beijing. Selain China dan Korea Utara, negara lain yang ikut pertemuan yakni Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan). Tiga pertemuan awal tidak memberikan hasil, namun pada pertemuan keempat memberika

pengertian satu sama lain. Korea Utara menyatakan kesiapannya untuk menghentikan program senjata nuklirnya, dan Amerika Serikat akan berjanji tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan Rezim Korea Utara. Namun setelah pertemuan tersebut berakhir, terdapat konflik antara Pyongyang dan Washington, yang mana Washington menyatakan bahwa disarmament adalah langkah awal yang harus dilakukan Korea Utara hingga Washington akan mempertimbangkan permintaan Korea Utara akan reaktor air ringan. Namun Pyongyang memberikan pernyataan bahwa reaktor ringan harus disediakan sebelum disarmament dimulai (Perry, 2006, hal. 83-84).

Pada tanggal 4 Juli 2006, Korea Utara setidaknya telah melakukan uji coba, termasuk rudal jarak jauh Taepodong 2. Hal tersebut membuat situasi di Semenanjung Korea menjadi semakin rumit. Dewan Keamanan PBB memutuskan telah memberikan sanksi terhadap sikap Korea Utara yang masih membuat situasi rumit dengan uji coba tersebut. Sanksi yang diberikan yakni larangan ekspor dan impor material rudal untuk Korea Utara. Tanggapan yang diberikan oleh Korea Utara terhadap sanksi tersebut pun mendapat tolakan dari Korea Utara untuk menghentikan program yang dimilikinya, dan akan mengumumkan akan tetap melakukan uji coba nuklir guna memperkuat pertahanan negaranya atas sikap permusuhan yang diberikan oleh Amerika Serikat (Woo, 2007). Pada akhirnya di tanggal 9 Oktober 2006, Korea Utara benar-benar melakukan serangkaian uji coba nuklir. Mereka menyatakan bahwa dalam uji coba tersebut berjalan dengan aman dan sukses, walaupun setidaknya ada kegagalan yang dialami. Tanggapan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB terkait uji coba nuklir yang telah dilakukan Korea Utara berupa resolusi 1718, yang menjatuhkan sanksi keuangan dan senjata kepada Korea Utara. Secara rinci, bahwa adanya resolusi tersebut menginginkan Korea Utara agar menghilangkan seluruh senjata nuklir yang dimilikinya, termasuk senjata pemusnah masal dan rudal balistiknya (Heo & Woo, 2008, hal. 496).

Perjanjian yang dihasilkan dari pertemuan enam negara di Beijing pada bulan Februari 2007 yaitu *Initial Actions for the Implementation of the Joint Statement*. Isi dari perjanjian tersebut adalah penutupan dan penyegehan fasilitas nuklir yang ada di Yongbyon, mendiskusikan seluruh daftar program nuklir yang dimiliki Korea Utara, dan penarikan atas tuduhan bahwa Korea Utara mendukung gerakan terorisme. Selain itu, juga merupakan langkah awal untuk pembicaraan bilateral Korea Utara dengan Amerika Serikat dan Jepang. Terdapat persediaan 50 ribu ton bahan bakar minyak yang diberikan ke Korea Utara dalam kurun waktu 60 hari dan pembentukan kelompok kerja sebagai alat diskusi dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut. Lima kelompok kerja yang dibuat yakni:

- Normalisasi hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat
- Denuklirisasi di Semenanjung Korea
- Normalisasi hubungan Korea Utara dengan Jepang
- Menjalin kerjasama ekonomi dan energi
- Mekanisme perdamaian dan keamanan di Asia Timur (NCNK, 2010).

Amerika Serikat pada masa Presiden Bush berkeinginan untuk memberikan keyakinan terhadap Korea Utara dengan menulis surat pribadi kepada pemimpin Korea Utara masa itu Kim Jong-il pada tanggal 1 Desember 2007. Presiden Bush berkeinginan untuk melakukan normalisasi terkait hubungan kedua negara jika Korea Utara benar-benar memperbolehkan untuk melihat program nuklir yang dimilikinya dan membekukannya. Presiden Bush menganggap hal tersebut penting bagi Korea Utara untuk mendeklarasikan jumlah hulu ledak yang dibangun serta jumlah misil yang telah diproduksi. Keinginan lain Presiden Bush yakni meminta Korea Utara agar memperlihatkan segala jenis material, peralatan, dan ahli nuklir baik yang masih berada di Korea Utara atau yang sudah ditransfer ke negara-negara lain (SIPRI, 2008, hal. 354).

Pada tanggal 31 Desember 2007, terdapat laporan yang tidak tuntas serta laporan yang tidak lengkap terkait penutupan

fasilitas nuklir. Korea Utara sendiri pada awal tahun 2008 telah menyatakan bahwa mereka sudah memberikan laporan yang sebenarnya di bulan November 2007, namun Amerika Serikat menganggap bahwa laporan yang diserahkan pada waktu bulan November 2007 masih belum lengkap. Terdapat laporan dari Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Hill yang mengunjungi Korea Utara untuk memeriksa laporan tersebut, bahwa data yang diberikan tidak sesuai dengan program pengayaan uranium, jumlah plutonium yang sebenarnya, dan perluasan dimana Korea Utara telah membantu Syria (Oh, 2008).

Peluncuran roket yang diklaim Korea Utara adalah satelit komunikasi pada bulan April 2009 yang melewati wilayah udara Jepang, diperkirakan Korea Utara telah memproduksi 40-50 kg plutonium dan memiliki 5-10 senjata nuklir. Selain itu juga diperkirakan bahwa Korea Utara sudah memproduksi 75 kg Highly Enriched Uranium (HEU) semenjak tahun 2005 yang mampu menghasilkan tiga senjata HEU setiap tahunnya. Pada tanggal 25 Mei, Korea Utara memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir yang dilanjutkan dengan uji coba tambahan terhadap beberapa misil jarak dekat. Aksi yang telah dilakukan Korea Utara tersebut mendapat kecaman dari komunitas internasional sebagai tindakan provokatif, sehingga Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1874 pada tanggal 12 Juni 2009 yang berisi sanksi terhadap Korea Utara (Er-Win, 2009, hal. 552).

D. Faktor Pendukung Adanya Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara

Setelah berakhirnya perang dingin, berakhir pula bantuan-bantuan yang diterima Korea Utara dari blok-blok komunis. Walaupun negara tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap pengembangan senjata nuklir, namun banyak dari petinggi Korea Utara yang percaya bahwa kekuatan militer konvensional mereka masih kalah dari lawan-lawannya, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Karena itu, senjata nuklir merupakan alat deterrence yang bisa melindungi Korea

Utara dalam jangka panjang. Pertama adalah alasan keamanan, merupakan fakta dari ideologi yang dianutnya, yaitu Juche. Ideologi tersebut sengaja dirancang untuk menutup pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari dunia luar yang dapat mengancam keamanan Korea Utara. Selanjutnya adalah alasan politisi, yang mana dengan adanya pengembangan senjata nuklir, Korea Utara ingin menaikkan posisi tawar (*bargaining power*) negara mereka di dunia internasional. Berkaitan dengan adanya komunitas internasional yang menginginkan pengasingan dan adanya penekanan terhadap Korea Utara. Dengan adanya senjata nuklir yang dimilikinya, akan memberikan tekanan terhadap internasional agar Korea Utara dapat dilibatkan dalam percaturan global (Mansourouv, 1995, hal. 50).

Alasan selanjutnya yaitu faktor ekonomi, Korea Utara menggunakan program nuklirnya sebagai alat untuk melakukan pemerasan terhadap negara-negara disekitarnya agar memberikan bantuan ekonomi. Kondisi yang dilakukan Korea Utara adalah menghentikan sementara program nuklirnya atau memperbolehkan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk melakukan inspeksi terhadap program nuklirnya dengan imbalan mengirimkan bantuan bahan bakar dan makanan dari China dan Korea Selatan. Selain hal tersebut juga dapat digunakan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan Korea Utara lainnya, seperti mencabut sanksi keuangan internasional yang diterima Korea Utara. Seperti yang kita ketahui, bahwa hingga saat ini Korea Utara masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya. Tujuan selanjutnya dari pengembangan senjata nuklirnya adalah untuk mencapai kesetaraan dengan negara tetangga termasuk Korea Selatan serta sebagai alat untuk memeras negara lain agar mendapatkan keuntungan (Mansourouv, 1995, hal. 50). Tercatat bahwa Korea Utara telah beberapa kali melakukan uji coba peluncuran senjata masal tersebut. Dari percobaan-percobaan tersebut telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit, yang muncul akibat adanya manifestasi dua doktrin yang menuntun tindakan para petinggi militer di Korea

Utara serta menentukan bentuk dari politik yang dimiliki Korea Utara. Dua doktrin tersebut yaitu:

1. Kangsong Taeguk yang berarti pemikiran mengenai pentingnya membangun negara yang kuat dan sejahtera,
2. Songun Chongchi atau keutamaan militer (Sagan, 1996-1997).

E. Perkembangan Uji Coba Senjata Nuklir di Korea Utara

Dalam menentukan kebijakannya, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri, Korea Utara tidak bisa lepas dari ideologinya Juche. Ideologi yang menentukan bahwa Korea Utara berhak untuk menentukan nasib negaranya sendiri, serta terlepas dari pengaruh negara lain. Dalam mendukung selama pengembangan senjata nuklir tersebut, Korea Utara terus melakukan serangkaian uji coba. Dari sekian uji coba yang telah dilakukan, Korea Utara telah mengklaim bahwa banyak mengalami keberhasilan, walaupun juga pernah mengalami kegagalan. Dengan banyaknya keberhasilan uji coba, menguatkan perannya sebagai negara atas kepemilikan senjata nuklir. Serangkaian uji coba yang telah dilakukan pun juga sebagai strategi Korea Utara dalam memperkuat posisi tawar politiknya di percaturan internasional.

Isu Nuklir semakin memanas ketika Pyongyang berhasil mengembangkan sekaligus dalam melakukan uji coba terhadap misil Rodong 1 yang hulu ledaknya memiliki radius 1000 km. Kemudian disusul oleh pengembangan misil Nodong 1 dan Nodong 2 dengan jangkauan hingga 3.500 km. Selain dari itu, juga mengalami keberhasilan dalam melakukan pengembangan senjata nuklir tipe Taepodong 1 dan Taepodong 2. Taepodong 1 sendiri tercatat memiliki kekuatan jarak tempuh mencapai 1.500 sampai 2.000 km, dengan hulu ledaknya sebesar 1.000 hingga 1.500 kg. Sedangkan untuk Taepodong 2 selesai dikembangkan pada tahun 2004 dengan kemampuan 4.400 hingga 6.700 km dengan kekuatan ledak yang tinggi (Studies, 2004).

Pengelolaan plutonium dan parameter uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara yakni (Publisher, 2009, hal. 153):

Tabel 3.5.1
Produksi dan Pengelolaan Plutonium Korea Utara

Produksi Plutonium		Pengelolaan Plutonium	
Tahun	Jumlah (kg)	Tahun	Jumlah (kg)
Sebelum 1990	1-10	1989-1992	0-10
1994	27-29	2003-2004	20-28
2005	13-17	2005-2006	13-17
Juli 2007	10-13	2009	8-12
Total	51-69	Total	41-67

Sumber: Lynne Rienner, Asian Perspective, 2009

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selama dua dekade terakhir, Korea Utara memiliki kesempatan untuk dapat melakukan ekstrasi bahan bakar yang mengandung hingga 69 kg plutonium.

Tabel 3.5.2
Parameter uji coba nuklir Korea Utara 2006 dan 2009

Tanggal Uji Coba Nuklir	Perkiraan Hasil
9 Oktober 2006	0.5-0.8 kiloton
25 Mei 2009	2.0-4.0 kiloton

Sumber: Lynne Rienner, Asian Perspective, 2009

Dapat ditegaskan bahwa uji coba yang dilakukan Korea Utara yang kedua lebih sukses daripada yang sebelumnya. Jika jumlah plutonium yang digunakan sama seperti uji coba yang pertama, maka dapat dipastikan Korea Utara dapat memiliki teknologi yang lebih maju. Program Nuklir yang dimiliki Korea Utara merupakan suatu upaya untuk kelangsungan bangsa. Dengan kelangsungan nuklir tersebut, otomatis Korea Utara akan terhubung secara langsung oleh Amerika Serikat untuk setidaknya mendapatkan jaminan dalam kelangsungannya.

Bulan Mei 2009, merupakan tanggal dimana Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang kedua. Uji coba yang dilakukan juga berada dalam situs bawah tanah. USGS dalam pernyataannya, mengeluarkan data bahwa tes senjata nuklir yang dilakukan tersebut menyebabkan gempa berkekuatan 4.7 skala richter di daerah Kilju di timur laut negara tersebut. Ledakan yang dihasilkan, diperkirakan menghasilkan ledakan dua sampai delapan kiloton. Ledakan tersebut pun juga dirasakan didaerah Yanji, area yang berjarak lebih dari 200 km di kota perbatasan China (Muhaimin, 2017).

Kemudian uji coba senjata nuklir yang ketiga dilakukan pada bulan Februari 2013, merupakan uji coba pertama yang dilakukan pada masa kepemimpinan Kim Jong-un. Merupakan jenis tes terbesar dari tes-tes sebelumnya dalam menimbulkan ledakan, dimana para ahli memperkirakan bahwa bom nuklir yang diledakkan berkekuatan enam hingga 7 kiloton. Dari pihak Pyongyang sendiri mengatakan bahwa pihaknya menggunakan perangkat nuklir miniatur dan ringan dengan kekuatan ledakan yang lebih besar dari sebelumnya. Para ahli dari Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat pada waktu itu mencatat getaran gempa yang dihasilkan di daerah Punggye-ri berkekuatan 4.7-5.2 skala richter (Muhaimin, 2017).

Uji coba nuklir Korea Utara yang kelima dilakukan pada tanggal 9 September 2016 di Situs Uji Coba Nuklir Punggye-ri, berada sekitar 50 km sebelah barat laut dari kota Kilju. Uji coba tersebut dilatar belakangi oleh uji coba nuklir Korea Utara ke empat yang dilakukan pada bulan Januari 2016, yang menuai banyak kecaman dan kritikan dari masyarakat internasional. Walaupun dari Tiongkok dan Rusia sudah menyerukan agar Korea Utara untuk kembali ke hasil kesepakatan perundingan enam negara, namun Korea Utara masih tetap bersikeras dalam mempertahankan ambisinya untuk mengembangkan senjata nuklir. Terdapat dua keberhasilan yang diperoleh Korea Utara dalam hal meluncurkan roket sebelum melakukan tes uji coba senjata nuklir, yaitu pada tanggal 22 Juni 2016, dimana Korea Utara meluncurkan rudal

darat jarak menengah Musudan-1 di ketinggian 1.413.7 km dengan jarak jangkauan 400 km. Kemudian peluncuran yang kedua dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2016, yang mana Korea Utara berhasil meluncurkan rudal balistik berbasis kapal selam Pukkuksong-1 ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Jepang dengan jangkauan 500 km dan dengan ketinggian yang sama.

Korea Utara menganggap bahwa latihan militer gabungan dua tahunnya antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan sebagai kekuatan musuh yang sedang mempersiapkan invasi ke Korea Utara. Sehingga pada tanggal 5 September 2016, Korea Utara menembakkan tiga rudal Rodong-1 berturut-turut dengan akurasi yang tinggi (Griffiths, 2016). Hal tersebut menandai bahwa Rodong-1 merupakan rudal yang layak untuk dioperasikan dalam perang sejak pertama sukses meluncur pada tahun 1993. Uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara pun mendapatkan kecaman dari Dewan Keamanan PBB, namun direspon keras oleh Korea Utara (CNA, 2016). Menurut perkiraan pemerintah Korea Selatan dan Jepang, daya ledak yang dihasilkan setara dengan sekitar 10 kiloton TNT, yang dapat menghasilkan gempa sekitar 5.3 skala kekuatan momen. Merupakan daya ledak tertinggi yang pernah dicapai oleh Korea Utara (BBCNews, 2016).

Uji coba tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat internasional, yang memicu banyak kecaman dari berbagai macam pihak. Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sepakat untuk bersama-sama mengambil tindakan yang signifikan, termasuk sanksi baru guna menunjukkan kepada Korea Utara bahwa ada konsekuensi terhadap tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya (Jung-a, 2016). Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang akhirnya membuat rapat darurat tertutup dengan Dewan Keamanan PBB, dan pada akhirnya nanti akan diberikan sanksi serius untuk Korea Utara dalam bentuk sebuah resolusi baru.